

ABRI dan Demokratisasi di Indonesia

Yahya A. Muhaimin *)

PENDAHULUAN

Suatu peristiwa besar yang amat monumental dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia telah terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, yaitu ketika Presiden Soeharto secara tidak begitu terduga menyatakan turun dari kepresidenan Republik Indonesia dan kemudian menyerahkan jabatan Presiden RI kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Tindakan itu dilakukannya setelah mendapat tekanan berat dari kalangan perguruan tinggi dan masyarakat menyusul krisis ekonomi dan moneter dan didahului oleh musim kemarau berkepanjangan akibat "El Nino".

Para pendukung Presiden Soeharto dan ABRI benar-benar tidak berdaya lagi mempertahankan otoritas dan legitimasi Presiden Soeharto yang sejak menjelang Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998 mendapat kecaman dan kritik tajam dari berbagai pihak dalam masyarakat, terutama dari kalangan perguruan tinggi. Sejak waktu itulah, Indonesia memasuki masa yang dikenal

*) Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, dan Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, Universitas Gadjah Mada.

dengan “Era Reformasi” yang sekali lagi membukakan pintu bagi berlangsungnya proses demokratisasi. (Kesempatan bagi proses demokratisasi yang pernah kita punyai adalah pada masa awal 1950-an, dan pada awal 1966). Sudah sekian lama sejak mendapatkan kedaulatannya, rakyat Indonesia tidak henti-hentinya berusaha untuk mendapatkan bentuk demokrasi yang “pas” bagi bangsa Indonesia, di mana kalangan militer - karena berbagai alasan dan faktor - memiliki kecenderungan kuat selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan demokratisasi.

Tulisan ini akan sepintas mengantarkan ke pembahasan mengenai peran militer Indonesia dalam hubungannya dengan proses demokratisasi di Indonesia terutama dalam “Massa Reformasi” 1998 ini, dengan lebih dahulu menengahkan beberapa aspek dari demokrasi.

BEBERAPA ASPEK DEMOKRASI

Sistem demokrasi dalam masyarakat tidak lepas sama sekali dari dan pasti akan terikat pada cara berpikir dan falsafah hidup serta nilai-nilai kultural yang dipegang oleh anggota masyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya banyak ahli yang menegaskan adanya keragaman sistem demokrasi di dunia.¹ Namun, ada beberapa aspek universal yang perlu ditekankan di sini mengenai demokrasi.

Pertama, dalam sistem demokrasi berlaku adanya penyaluran aspirasi dari masyarakat secara relatif bebas melalui aturan yang disepakati bersama atau kesepakatan.² Penyaluran aspirasi ini yang dinamakan partisipasi politik, yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang tersedia yang dibentuk secara relatif bebas dan longgar serta tanpa paksaan (sukarela).³ Lembaga-lembaga penyalur tersebut misalnya partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan (yang bertumpu pada penghargaan pada hak-hak dan kewajiban

¹ Di dalam tulisan ini, kita tidak akan membahas atau memperdebatkan masalah sistem demokrasi yang memang bisa kita lihat cukup bervariasi, Misalnya, Demokrasi di AS, Jepang, Malaysia, Inggris, Belgia, Perancis dsb. Antara yang satu dengan yang lain memiliki kekhasan. Namun, bisa ditegaskan bahwa demokrasi di sini dilawan dengan sistem diktator atau otoritarian maupun anarkisme. Lihat, misalnya tulisan Schmitter dalam, Greenstein, Ed. *Handbook of Political Science*; juga T.J. Pempel *Democracy in Japan*, serta Giovanni Sartori *Theory of Democracy Revisited*.

² Kesepakatan bersama dapat berupa, misalnya, konstitusi, Undang-undang, hukum dan berbagai bentuk peraturan baik pada tingkat nasional maupun lokal.

³ Pada sistem otoriter (atau *limited pluralism*) organisasi penyalur kepentingan itu sifatnya tunggal, hirarkis, terbatas dan paksaan (*compulsory*).

yang dimiliki anggota masyarakat) serta mungkin juga birokrasi dan lain-lainnya. Di sini asas “egaliter” dan “equality” menjadi sangat sentral bagi kehidupan masyarakat demokratis. Karena itu, integral dengan hal-hal di atas, keterbukaan dan transparansi, sesuai dengan kesepakatan bersama (Undang-undang, hukum, dan peraturan-peraturan lain) menjadi prinsip-prinsip yang amat fundamental dalam kehidupan setiap sistem demokrasi. Dari sini kita menyadari bahwa kejujuran menjadi *conditio sine qua non* bagi masyarakat demokratis agar tercapai kehidupan yang makmur, sejahtera dan ketentraman. Tenteram, oleh karena semua anggota masyarakat merasa dijamin keamanan hak-hak dan kewajibannya. Masyarakat demokratis, di samping menempatkan kejujuran sebagai fondasi, juga menjadikan peradaban dan budaya yang luhur sebagai sifat dan karakteristiknya yang amat menonjol. Karena itu, tidak mungkin masyarakat demokratis bisa diciptakan dan dipertahankan kalau tidak ada kejujuran dan tanpa budaya yang luhur. Tidak ada demokrasi tanpa kejujuran dan konsistensi. Kejujuran adalah jantung kehidupan demokrasi.

Kedua, integral dengan hal tersebut di atas, masyarakat demokratis selalu menempatkan “cara” menjadi hal yang sangat sentral, yaitu bahwa tidak semua cara bisa diperkenankan untuk mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Tujuan (kepentingan) yang hendak dicapai oleh anggota masyarakat demokratis harus dengan cara yang demokratis pula. Standar umum bagi cara yang demokratis yaitu bahwa cara tersebut harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kewajiban anggota kelompok lainnya dalam masyarakat. Dalil dari sistem politik otoritarian yang machiavellis maupun yang anarkis “*the end justifies the means*” tidak dikenal sama sekali dalam masyarakat demokratis. Dalil klasik yang berlaku dalam masyarakat demokratis yaitu “*the means must be consonant with ends*” (cara yang digunakan harus sama baiknya dengan tujuan yang hendak dicapai).⁴ Karena itu, pencapaian tujuan dan kepentingan dalam masyarakat demokratis relatif lambat dan membutuhkan “kesabaran” dari setiap anggota masyarakat.⁵

⁴ T.V. Smith & Edward C. Lendeman, *The Democratis Way of Life* (New York, N.Y.: The New American Library of World Literature, Inc., 1960) hal. 124, dan 124 - 130 *passim*.

⁵ Bandingkan dengan pepatah dalam masyarakat kita “biar lambat asal selamat” (atau “alon-alon waton kelakon”). Pepatah ini harus ditransformasikan secara kultural dalam kehidupan modern, sebagaimana bangsa Jepang yang melakukan hal yang sama, misalnya pada jaman Tokugawa tentang watak samurai yang dinamis dan disiplin.

Semua aturan-aturan harus diikuti secara baik dan adil, sebab peraturannya itu sendiri “memang harus adil” karena dibuat dengan kesepakatan bersama untuk kepentingan umum. Dengan berpegang pada beberapa prinsip tersebut di atas marilah kita melihat beberapa dimensi dari demokrasi di Indonesia.

UUD 1945 DAN DEMOKRASI

Bila kita melihat kesepakatan bangsa Indonesia sebagaimana kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 dan seluruh pasal dalam konstitusi tersebut, maka jelas sekali bahwa Bangsa Indonesia bukan menganut sistem diktator dan bukan pula berpegang pada anarkisme, sebab UUD 45 sama sekali jauh dari sifat machiavellis. Sesuai dengan seluruh isi UUD 45, Indonesia secara prinsipil dan konsepsionil memegang dan menggunakan sistem demokrasi. Penting sekali bagi kita untuk selalu melihat falsafah dan jalan pikiran para penyusun konstitusi tersebut, para *founding fathers*, sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen, misalnya saja, yang ditulis oleh Prof. Mohamad Yamin.⁶

Namun dari pengalaman yang lalu pelaksanaan UUD 45 ternyata beberapa kali mengalami penyelewengan yang serius, sebagaimana kita ketahui dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, misalnya pada masa Pemerintahan Soekarno⁷ dan juga pada Pemerintahan Soeharto⁸. Penafsiran-penafsiran

⁶ Mohamad Yamin, *Naskah UUD 1945*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959; Jilid I). Referensi historis ini amat biasa dilakukan oleh masyarakat AS, misalnya, tatkala ada masalah yang timbul karena perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan, maka pemikiran-pemikiran atau pernyataan-pernyataan yang dahulu dikemukakan oleh pemikir dan pejuang terdahulu, seperti Alexis de Toqueville, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Harry Truman atau lainnya, kerap kali muncul dijadikan referensi pokok.

⁷ Untuk mengetahui pelaksanaan UUD 45 pada masa Revolusi 45., lihat misalnya, George Mc. T Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1966) sedangkan pada masa Soekarno, lihat Herbert Feith, “*The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*”, (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1964), juga Hiebert Feith, “*The Dynamics of Guided Democracy*” dalam Ruth Mc Vey, ed., *Indonesia* (New Haven, Conn.: Yale University Press, & HRAF 1967, Revised); kita lebih relevan menyebut “Pemerintahan Soekarno” daripada “Pemerintahan Orde Lama”.

⁸ Untuk mengetahui beberapa dimensi dari Pemerintahan Soeharto, lihat, misalnya: Karl Jackson & Lucian W. Pye, eds., *Political Power and Communications in-Indonesia* (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1978), juga, Yahya A. Muhaimin *Bisnis dan Politik* (Jakarta., Penerbit LP3ES, 1991). Banyak juga informasi dan analisa yang ditulis di berbagai media massa sekitar bulan-bulan menjelang timbulnya krisis ekonomi dan politik 1967/1998. Di sini menggunakan sebutan “Pemerintahan Suharto” lebih pas daripada menggunakan sebutan “Pemerintahan Orde Baru”.

terhadap UUD 45 yang kemudian berupa distorsi yang serius adalah yang mengakibatkan UUD 45 seolah-olah mempunyai wajah yang tidak demokratis, seakan-akan berwajah otoriter. Namun, kekenyalan UUD 1945 dapat dijadikan untuk memantapkan mekanisme guna penyempurnaan pelaksanaan konstitusi tersebut sesuai dengan perkembangan zaman yaitu misalnya dengan membuat amandemen-amandemen. Teknik amandemen ini sangat menonjol dalam penerapan konstitusional yang demokratis di AS.

MILITER DAN POLITIK

Setelah kita membicarakan secara garis besar mengenai beberapa dimensi demokrasi di Indonesia dalam kaitan dengan UUD-45, marilah kita melihat peranan militer Indonesia dengan lebih dulu membicarakan sekedarnya ciri-ciri militer secara umum. Militer di manapun di dunia adalah suatu lembaga yang eksistensinya memang didirikan untuk menciptakan dan memelihara keamanan anggota masyarakat dan mempertahankan negara dari ancaman musuh, terutama yang datang dari luar negara. Kedudukan militer seperti ini yang kemudian disebut bahwa tugas dan fungsi militer adalah berupa fungsi pertahanan dan keamanan (fungsi hankam), dan bahwa militer yang profesional adalah militer yang memiliki kemahiran, keahlian, perlengkapan, dan organisasi yang memadai untuk tugas pertahanan dan keamanan tersebut.⁹

Namun, dalam perjalanan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, kalangan militer Indonesia baik secara perseorangan maupun secara institusional telah terlibat dalam fungsi-fungsi sosial-politik.¹⁰ Keterlibatan tersebut kelihatan secara intensif sejak tahun 1952 dan secara gradual mencapai titik kulminasi setelah berproses lebih dari 40 tahun, yaitu tatkala militer

⁹ Tentang profesionalisme militer, lihat, misalnya, Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State*, (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1957); lihat juga Samuel E. Finer, *The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics* (New York, N.Y. Frederick A. Praeger, 1962), halaman 7-10.

¹⁰ Banyak informasi akademik mengenai militer Indonesia dalam bidang sosial-politik-ekonomi; misalnya : Ulf Sundhaussen, dalam, Karl Jackson dan Lucian W. Pye, eds., op.cit. juga dalam, Harold Crouch, *The Indonesian Army and Politics in Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1978), juga dalam, Guy J. Paker, "The Role of Military in Indonesia" dalam John J. Johnson, ed., *The Role of the Military in Undeveloped Countries* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1967) dan juga dalam, Yahya A. Muhaimin *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982)

Indonesia secara sangat menonjol menjadi salah satu tulang punggung proses pembangunan nasional pada Pemerintahan Soeharto. Keterlibatan dan peranan militer Indonesia dalam politik ini rupanya memang bukan hal yang konvensional dalam sejarah perkembangan militer dunia. Anti-klimak peranan militer Indonesia dalam politik ini terjadi berbarengan dengan (tidak lama sesudah) runtuhnya kekuasaan politik Presiden Soeharto yang dianggap “corrupt”.

Sudah lama banyak kalangan berpendapat bahwa militer di Indonesia sebagai kekuatan politik mempunyai kekuasaan yang eksetif, mengemban “*weight of power*” yang terlalu besar¹¹; dan kaum militer ini justru merupakan alat penopang penting bagi sistem politik pada masa pemerintahan Soeharto. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa peranan militer ini dirasakan telah berubah, yaitu tidak lagi sebagaimana pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya tatkala militer Indonesia menjadi kekuatan politik penting dalam menentang otoritarianisme Presiden Soekarno, dan merupakan faktor penting dan menentukan pada masa sebelumnya; Mayor Jenderal Suwanto (almarhum), Letnan Jenderal T.B. Simatupang (alm.), Jenderal A.H. Nasution mempunyai peran sangat besar pada waktu itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan militer Indonesia mengalami perubahan peran dalam kaitannya dengan proses pembinaan kehidupan politik atau proses demokratisasi; berubah dari peran yang konstruktif bagi proses pembinaan demokrasi Pancasila menjadi kekuatan politik yang peranannya di bidang politik dipertanyakan oleh banyak kalangan.

Pertama, militer di manapun, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, dalam kehidupan bangsa secara inheren mempunyai *political strength*.¹² Namun, hal ini ternyata membawa eksese dan konskuensi yang cukup luas dan mendalam pada berbagai bidang kehidupan masyarakat di Indonesia, oleh karena dalam *time-frame* yang lama hal tersebut secara konsepsional maupun secara kongkrit tidak mendapat penanganan yang memadai.

¹¹ Terminologi “*weight of power*” ini diambil dari Harold Lasswell dan Abraham Kaplan, “*Power and Security: A Framework for Political Inquiry*”, (New Haven, Conn., Yale University Press, 1950), halaman 73-77 dan 143.

¹² S.E. Finer, op.cit., halaman 11 *passim*. Di samping memiliki “*political strength*”, militer juga mengidap “*political weakness*”.

Kedua, tugas dan beban militer secara akseleratif menjadi semakin bertambah berat, terutama karena tugas-tugas kepolisian dimasukkan secara integral dalam struktur kemiliteran Indonesia yang kemudian dinamakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Beban tugas polisionil yang dilekatkan kepada militer tersebut benar-benar amat memberatkan tugas hankam militer. Hal ini dalam satu segi karena kurang memadainya pembinaan aparat kepolisian oleh pimpinan ABRI, dan dalam segi lain masalah ketertiban masyarakat, seiring dengan deras dan cepatnya proses modernisasi masyarakat, menjadi semakin kompleks terutama dalam dua dasawarsa terakhir ini.

Ketiga, proses modernisasi, terutama dalam bidang ekonomi, telah menyebabkan adanya kecenderungan pada ABRI dalam membina bidang hankam dari waktu ke waktu menjadi kurang seimbang dibandingkan dengan pembinaan aktifitas ABRI di bidang sosial, politik dan ekonomi. Dan kita tahu bahwa kekuatan militer di bidang hankam tersebut yang justru secara inheren militer mempunyai *political strenght*. Di samping itu penanganan bidang hankam yang kurang memadai jelas akan tidak menguntungkan bangsa dan negara seperti Indonesia yang letaknya “terkepung” oleh 10 negara tetangga dan berada di tengah lalu lintas perdagangan dunia antara Samudera Hindia dan Pasifik, di antara benua Asia dan Australia, dan justru terdiri dari ribuan kepulauan. Kondisi obyektif seperti itu memerlukan kekuatan hankam yang betul-betul memadai terutama pada matra udara dan matra laut, di samping matra darat. Kecenderungan seperti ini mengakibatkan timbulnya kecenderungan lain pada kalangan personil ABRI, yaitu mengendurnya “disiplin” dan mungkin juga agak melemahnya “semangat tempur”. Cukup banyak para “oknum-oknum” ABRI yang melakukan berbagai pelanggaran di bidang sosial, politik dan ekonomi. Kecenderungan seperti ini di samping tidak menopang proses pembinaan demokrasi di Indonesia, juga menjadi *counter-productive* terhadap esensi keterlibatan militer dalam pembangunan nasional sehingga *image* militer di hadapan masyarakat turun maka kehidupan keamanan nasional pasti mengalami dampak negatif tersebut secara langsung.

Keempat, cepat dan derasnya proses globalisasi yang menuntut keterbukaan dan efektifitas dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, memang telah dipikirkan dan telah ditanggapi oleh ABRI, hanya saja respon tersebut rupanya belum memadai. Proses globalisasi yang dibarengi kemajuan luar biasa di bidang teknologi terutama di bidang telekomunikasi dan transportasi,

yang menyebabkan tingginya mobilitas anggota masyarakat di segala bidang tidak secara memadai ditanggapi oleh militer. Implikasinya adalah bahwa di bidang sosial politik-ekonomi, walaupun peranan ABRI masih tetap penting dan dominan, namun tidak *compatible* dengan tuntutan masyarakat umum belakangan ini, sebab keterbukaan maupun efektifitas yang dibina bukan yang secara esensial diperlukan oleh tuntutan globalisasi tersebut, namun yang dibina adalah dalam kerangka kepentingan dan tradisi kemiliteran.

Kelima, para perwira “Generasi 45” dan juga generasi alumni Akademi Militer sebelum 1975-an — katakan saja “Generasi Penyambung” — kelihatan tidak seimbang dengan kalangan sipil dalam memecahkan masalah politik, apalagi masalah ekonomi nasional. Di samping itu kecenderungan kebanyakan para perwira generasi sesudah pertengahan tahun 1970-an — bisa disebut “Generasi Orde Baru” — kelihatan mempunyai minat yang lebih kecil terhadap kegiatan di bidang sosial politik dibandingkan dengan Generasi ‘45 atau “Generasi Penyambung” tersebut. Hal ini disebabkan dalam satu segi karena persiapan akademik dan pengalaman sosial politik yang berbeda dibanding dengan *counterpart* mereka dari kalangan sipil dan juga Generasi ‘45.

Bila dalam kondisi “ketidakpastian” seperti ini mereka “dipaksakan” oleh pimpinan ABRI untuk tetap melakukan kegiatan sosial-politik dengan intensitas sebagaimana pada masa yang lalu maka akan berakibat tidak konstruktif bagi kehidupan dan pembangunan bangsa dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta akan lebih lagi menurunkan “wibawa ABRI” dan “Kebanggaan terhadap ABRI” sebagai tulang punggung kekuatan hankam pada kalangan rakyat.

ABRI DAN DEMOKRATISASI

Dari hal-hal yang diutarakan di muka, kita dapat mengatakan adanya faktor “*psychopolitics*” perkembangan militer Indonesia dalam kehidupan politik nasional. Pada masa kini dan masa mendatang militer Indonesia secara individual atau secara institusional memerlukan saluran politik bagi kepentingan dan aspirasi mereka. Disamping itu ABRI mungkin dapat menjadi penyalur aspirasinya sendiri dan aspirasi kelompok masyarakat lainnya secara proporsional. Proporsional dalam arti bahwa tugas dan fungsi hankam harus mendapatkan perhatian dan prioritas yang lebih memadai dan juga mengurangi beban fungsi di bidang sosial politik ekonomi secara gradual

sehingga sampai pada titik di mana terdapat equilibrium antara peran yang dimiliki oleh militer dengan yang dimiliki oleh kelompok sipil di dalam bidang hankam maupun di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Namun, pada masa mendatang, sangat vital adanya *counter veiling power* terhadap peran ABRI dalam bidang politik agar tidak terjadi lagi ekkses-ekkses destruktif dalam masyarakat.

Untuk itu maka militer Indonesia perlu melakukan transformasi diri sehingga benar-benar menjadi "*non-traditional institution*", dan memiliki kedudukan yang pas didalam kehidupan bangsa pada masa kini dan masa mendatang. Hal ini dapat berarti; *pertama*, anggota ABRI diberi hak untuk memberikan suara dalam pemilihan anggota DPR maupun dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik yang ada, atau melalui perwakilan yang ditentukan oleh DPR untuk keperluan tersebut. Kedua hal tersebut disertai dengan syarat institusi militer akan bersikap dan bertindak netral dalam arti yang sebenar-benarnya dalam kehidupan politik. *Kedua*, militer mendapat sejumlah kursi perwakilan di dalam legislatif guna menyalurkan aspirasinya, di DPR dan MPR, atau dicukupkan hanya di MPR. Sedangkan pula di lembaga eksekutif militer tidak harus dilibatkan. Alternatif *ketiga*, anggota ABRI tidak mempunyai wakil di lembaga legislatif, namun dilibatkan di dalam jabatan-jabatan eksekutif tertentu pada tingkat nasional dengan catatan bahwa personal ABRI yang menduduki jabatan eksekutif bertanggungjawab kepada lembaga yang jelas (tidak dualistis dan tidak ambivalen); mungkin kepada lembaga eksekutif atasannya, atau dapat pula kepada lembaga otoritatif yang dibentuk khusus untuk keperluan tersebut oleh Presiden dan lembaga tersebut langsung di bawah otoritas presiden dan bersama DPR. Sedangkan, anggota-anggota lembaga tersebut diusulkan oleh Mabes ABRI dan disetujui oleh DPR, yaitu diambil baik dari kalangan militer dan kalangan "sipil murni" dalam jumlah yang proporsional. Dalam konteks ini, maka anggota ABRI yang telah berhenti, secara struktural dan fungsional tidak lagi mempunyai hubungan langsung dengan Mabes ABRI. Namun perlu ditegaskan bahwa *software* ABRI yang sangat vital seperti "*Sapta Marga*" atau "*Delapan Wajib ABRI*" secara ideal memang harus dijiwai bukan hanya oleh anggota ABRI tetapi juga oleh para purnawirawan dan bahkan semangatnya harus juga dijiwai oleh seluruh warga negara Indonesia sebagaimana *nilai-nilai demokrasi* (pluralisme) yang tetap harus dijiwai oleh seluruh warga negara termasuk para anggota ABRI.

PENUTUP

Sebagai akhir dari tulisan ini saya ketengahkan pesan patriotik dari seorang pejuang dan pemikir revolusioner yang dia serukan kepada bangsanya tatkala menghadapi krisis dan saat-saat kritis akibat pertentangan keras dalam masyarakat yang membingungkan semua pihak; pesan tersebut saya kira sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini. Pesan itu adalah:

“Daripada saling pandang memandang dengan penuh kecurigaan dan rasa ingin tahu yang berisi kebingungan, marilah kita saling mengulurkan tangan yang tulus dan penuh rasa persahabatan dan bersatu pada membentuk satu barisan sebagai lambang persaudaraan serta dapat menghilangkan perselisihan yang selama ini ada. Marilah kita menghilangkan sebutan kelompok-kelompok partisan, dan janganlah ada sebutan lain yang kedengaran kecuali sebutan “warganegara yang baik; seorang sahabat yang lapang hati dan berpendirian tegas; seorang pembela yang jujur dari hak-hak azasi manusia dan Negara Republik Indonesia yang Merdeka, Demokratis dan Sejahtera”.